

**Kepemimpinan Yang Amanah Dan Perubahan Insfrastruktur Desa Pagar Merbau III
Kecamatan Lubuk Pakam**

¹Mira Nur Aisah, ²Nuri Aslami

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, miranuraisah3@gmail.com

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nuriaslami@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims of course to inform the description of the system of each work in the field within the scope of the village fence Merbau III with a mandate to the responsibility of a village head as a leader in a village scope that involves changes in the management of a village environment for the better. The research method used is a qualitative descriptive method. Where, the function of a village head is or can be said to be the role of the village head is to always provide attention, motivation, can affect the members, and of course provide the best facilities. With this, the technique of data collection or analysis is through literature study as a Supporting Role. Therefore, the results of this study is an effort to increase participation and programs to the community, one of which is called BUMDes (village-owned enterprises). Of course, a leader can provide the best things by improving the mindset of the community with useful and positive things. A leader in the administration of government in a work area that in the performance of its duties obtain the authority of the Government of the Regent to provide handling as a matter of regional autonomy and to hold a general task that is the responsibility of a village head in government.

Keywords: Trustful Leadership, Infrastructure Change,

Pendahuluan

Pembangunan pada desa tentunya menjadi bagian dari pembangunan nasional. Karena desa merupakan lingkup terkecil dari pemerintahan nasional. Pembangunan salah satu bentuk realisasi dari tujuan nasional negara Indonesia dalam pembukaan Undang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea empat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan terlepas dari itu juga bahwa bukan hanya kepala desa yang memili peran penting yang lebih, akan tetapi para perangkat yang ada didesa juga menjadi suatu peranan yang tidak dapat terlepas dari suatu kepentingan.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, sesuai undang-undang tersebut yang berwenang dalam pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu perangkat-perangkat desa, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa. Kinerja dan sikap kepala desa untuk melayani dan bukan untuk dilayani masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemahaman partisipasi masyarakat seringkali memiliki pengertian sebagai dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat pada suatu keputusan pemerintah saja. Oleh karena itu, ukuran yang dipakai adalah sejauh mana masyarakat menanggapi, melaksanakan dan mau mengikuti kehendak pemerintah tersebut, sehingga lebih bersifat top down (kepemimpinan Atas bawah). Apabila masyarakat tidak patuh dan tidak mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, maka masyarakat akan dianggap tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pandangan ini sebenarnya masyarakat lebih dilihat sebagai objek pembangunan bukan sekaligus subjek atau bagian dari pembuat pembangunan. Padahal partisipasi masyarakat merupakan kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Desa yang otonom akan mempunyai dan memberikan ruang gerak yang luas pada masyarakat dan akan memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, transportasi, administrasi sosial budaya dan keamanan. Otonomi desa biasanya disebut dengan otonomi masyarakat desa. Pada perwujudan otonomi masyarakat desa adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat, dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat disebutkan pada (Saragih 2004:29). Ciri dari otonomi masyarakat desa adanya kemampuan untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa menjalankan fungsinya dalam perwujudan pelayanan terhadap masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang optimal dalam pembangunan desa.

Kepemimpinan Kepala Desa Pagar Merbau III yang saat ini menjabat tentunya berbeda dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil kepemimpinannya selama menjabat kurang lebih 1 bulan, yang dilantik pada bulan Mei lalu. Masyarakat Desa saat ini terus meningkatkan proses pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Namun yang sangat terasa adalah pembangunan fisik Karena infrastruktur Desa Pagar Merbau III masih tertinggal terutama dalam infrastruktur jalan dan saluran air. Selain dari pada pembangunan kepala desa Pagar Merbau III juga menata sistem pemerintahan desa yang sebelumnya tidak aktif seperti lebih sering mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan, membagi kekuasaan yang sesuai tugas dan fungsi dari pada bawahannya dan menata manajemen pemerintahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bertujuan mendiskripsikan peran kepemimpinan kepala desa yang ada di desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa untuk masa yang akan mendatang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara secara langsung pada objek dan subjek penelitian. Oleh karena itu, peneliti terjun langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian yaitu antara lain Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Dengan hal mengumpulkan informasi yang mempermudah dalam mengumpulkan informasi yang lebih secara rinci dan efektif. Adapun penelitian ini juga dibantu pada studi pustaka.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dalam memajukan Desa tentu memerlukan adanya kepemimpinan yang baik agar terlaksana dan terarah dengan maksimal.

Kepala Desa Pagar Merbau III dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa mempunyai peran sebagai berikut:

a. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Inisiator Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian, kepala desa memiliki peran menjalankan fungsi inisiator pembangunan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa. Fungsi inisiator pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa yakni kepala desa Pagar Merbau III menjadi tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Namun, kepala desa juga melibatkan perangkat desa dan beberapa perwakilan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran untuk setiap rencana yang telah dibuat kepala desa. Dalam menyampaikan perencanaannya, kepala desa melaksanakan pertemuan setiap tahun dalam membahas program pembangunan tahunan dan setiap bulan dalam membahas progress tentang pembangunan yang telah terlaksana.

Pada pertemuan tersebut, sebagai kepala desa berperan sebagai pemimpin diskusi. Temuan penelitian ini sangat sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Effendy (1981:24-25) para pemimpin sebagai adalah seorang yang demokratis tidak lagi sebagai eksekutif akan tetapi sebagai pemimpin diskusi. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dilaksanakan kepala desa juga memberi arahan dan motivasi agar pembangunan yang telah terencana agar berjalan dengan baik sesuai visi dan misi.

Dalam penyampaian Rivai & Deddy (2009:34) menyatakan, bahwa pemimpin dalam menjalankan fungsi instruksi berperan sebagai komunikator yang merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dijalankan dengan efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

b. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Konsultasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi dapat dilakukan secara langsung kepada kepala desa atau dapat diwakilkan melalui perangkat-perangkat desa dengan komunikasi dua arah. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi konsultasi menurut Rivai & Deddy (2009:35) yakni Fungsi yang bersifat komunikasi dua arah, dalam menentukan keputusan pemimpin masih memerlukan pertimbangan dan konsultasi dengan bawahannya agar mendapatkan masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang akan ditetapkan.

c. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengendalian

Berdasarkan hasil penelitian, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengendalian telah diterapkan dengan baik oleh Kepala desa Prasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Kepala desa Pagar Merbau III.

Adapun pernyataan yang dikemukakan dalam pendapat Rivai & Deddy (2009:35) menyatakan bahwa pemimpin mampu mengatur aktivitas bawahannya secara terarah untuk mencapai tujuan secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan. Pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Tujuan dari fungsi ini agar seorang pemimpin tidak hanya memiliki perintah sebagai pemberi perintah saja melainkan sebagai pengendali dan penanggung jawab dari seluruh partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan Desa. Tujuan dari pengendalian kepala desa adalah untuk mengaktifkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan

kenyataan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi penelitian pembangunan jalan lingkungan dan perairan sawah pada setiap dusun di Desa.

d. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Delegasi

Berdasarkan hasil penelitian, peran kepemimpinan kepala Desa dalam menjalankan fungsi delegasi dilakukan untuk memaksimalkan tugas dari masing-masing perangkat desa. Kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing-masing perangkat desa maupun masyarakat dalam menjalankan tugas yang telah di amanahkan oleh kepala desa dan telah disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Rivai & Deddy (2009:35) yakni fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan kepada orang-orang yang diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Namun pemberian mandat atau tugas tersebut tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa. Sehingga, perlu adanya pelaporan agar kepala desa tetap dapat memantau jalannya program untuk kepentingan Desa.

Dalam hal pendapat Sondang P. Siagian (2002 : 67), menyatakan, bahwa dalam pembangunan desa secara defenisi ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan juga perubahan yang direncanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan yang modernitas dalam pembinaan bangsa dengan harapan kesejahteraan. Adapun hal keterkaitan dengan pembangunan desa perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, antara lain:

1. Sangat terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang profesional.
2. Terbatas sumber-sumber pembiayaan, baik dari kemampuan desa maupun sendiri (internal) yang juga berasal dari luar (eksternal).
3. Belum tersusun sempurna kelembagaan sosial-ekonomi yang berperan aktif.
4. Belum terbangunnya sistem regulasi yang tegas.
5. Kurangnya kreatifitas masyarakat yang kritis dan rasional.

e. mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Musrenbangdes adalah perencanaan program pembangunan desa yang diawali dengan pelaksanaan Muayawarah Rencana Pembangunan Desa. Pada hasil yang telah ditetapkan dengan tim koordinasi kecamatan. Adapun tujuan dari hal ini untuk menyepakati hasil-hasil Musrenbangdes untuk tingkat desa yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan dikecamatan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dilakukan kajian secara teoritis oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa, terbagi menjadi peran kepala desa dalam menjalankan fungsi sebagai seorang pemimpin, antara lain: Pertama, Kepala desa Pagar Merbau III dalam menjalankan fungsi inisiator pembangunan yakni bertindak sebagai tokoh utama dalam menentukan perencanaan pembangunan desa. Kedua, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi konsultasi yakni kepala desa bertindak sebagai konsultan yang menerapkan komunikasi dua arah dengan perangkat desa dan masyarakat desa Pagar Merbau III baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi pengendalian yakni kepala desa Prasi dalam menjalankan fungsi pengendalian

diwujudkan dengan adanya bimbingan, koordinasi pengarahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut bertujuan agar partisipasi masyarakat menjadi terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat, Peran kepemimpinan kepala desa dalam menjalankan fungsi delegasi yakni kepala desa memberikan mandat atau kepercayaan kepada masing-masing perangkat desa maupun masyarakat sesuai kemampuan masing-masing dalam pembangunan Desa Pagar Merbau III. Namun, pemberian mandat tetap berada dibawah tanggung jawab kepala desa sehingga perlu adanya laporan agar pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang pembangunan Desa terbagi menjadi dua bentuk partisipasi antara lain partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik dan non fisik antara lain sebagai berikut:
 1. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik diwujudkan dengan membangun sarana dan prasarana yang ada di Desa. Program utama dari pemerintahan Kepala desa Budi Cahyadi adalah Rabat beton atau jalan lingkungan dan irigasi yang disesuaikan dengan kondisi desa yang di. Selain itu, Program besar dalam bidang pembangunan fisik yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah perbaikan Irigasi dan bantuan gratis perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain program utama, terdapat pula pembangunan kecil seperti mushollah dan gotong royong membersihkan lingkungan yang rutin diadakan di setiap RT dan RW atau setiap dusun yang melibatkan partisipasi dari masyarakat Desa.
 2. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan non fisik yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan non fisik terdiri dari beberapa bidang antara lain bidang keagamaan yaitu pengajian rutin dan selamatan tahunan desa, pada bidang kesehatan yaitu posyandu lansia, posyandu balita dan penyuluhan kesehatan, pada bidang pendidikan yaitu adanya PAUD yang tersebar pada setiap dusun di Desa Pagar Merbau III, dan pada bidang sosial yaitu dengan adanya organisasi Remaja Mesjid dan karang taruna.
3. Kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa antara lain adanya masyarakat yang mementingkan materi atau upah sebelum mengikuti partisipasi pembangunan desa, adanya masyarakat memiliki kesibukan tersendiri, pencairan dana pembangunan desa yang lama dan keterbatasan waktu dan tenaga kepala desa.
4. Usaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi kepala desa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan desa antara lain adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa antara lain adanya upah yang sesuai dengan kinerja masyarakat, memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, mengatur dana pendapatan desa dengan efisien dan memanfaatkan keuntungan dari pendapatan asli desa dan pemberian tugas kepada perangkat desa sesuai bidang masing-masing.

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepala Desa Pagar Merbau III
Sebaiknya pengawasan terhadap kinerja perangkat-perangkat desa lebih dimaksimalkan kembali. Karena ada beberapa perangkat desa pada bidang tertentu tidak bekerja sesuai dengan tugasnya bahkan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa salah satu perangkat desa tidak terlihat kinerjanya sama sekali. Kemudian kepala desa juga perlu mengontrol dan melakukan koordinasi organisasi-organisasi khususnya pemuda desa untuk lebih aktif dan berkontribusi kepada Desa. Misalnya pada organisasi pemuda yaitu Remaja Mesjid (RM), BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia) ataupun karang taruna desa yang terlihat tidak aktif dalam beberapa kegiatan dan hanya aktif pada bidang kepelatihan saja, dan itupun belum tentu rutin.
2. Perangkat Desa
Perangkat desa perlu menerapkan sikap yang sopan dan ramah dengan baik dalam memberi pelayanan kepada masyarakat Desa. Karena ada beberapa perangkat yang kurang sopan dan ramah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak berani untuk menyampaikan aspirasi atau meminta bantuan secara langsung kepada perangkat desa. Selain itu, perangkat desa perlu lebih aktif dalam memantau perkembangan yang ada di Desa agar lebih maksimal dalam membantu Kepala Desa sehingga visi dan misi yang telah dibuat berjalan dengan baik dan membuat Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam lebih maju.
3. Masyarakat
Masyarakat sebaiknya lebih responsif terhadap pelaksanaan pembangunan desa tanpa mengharap imbalan terlebih dahulu. Perlu adanya kesadaran dari masing masing masyarakat bahwa pembangunan dilakukan untuk memajukan desa dan kesejahteraan bersama. Selain itu, masyarakat harus lebih aktif dalam memantau kinerja dari kepala desa dan perangkat-perangkat desa dan memberikan aspirasinya untuk memperbaiki kinerja dari aparatur desa tersebut yang menyimpang dalam menjalankan amanah.

Daftar Pustaka

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2009. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis data. Jakarta: Raja Grafindo
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 854 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa Sondang P. Siagian.2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, L. J., 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya Offset.
- Pandji, Anoraga. 1992. Psikologi Kerja. Jakarta: Rineka Cipta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Kamahuddin Rustian, 2006 : 53
- Rivai, Veitzhal & Deddy Mulyadi. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jakarta: Rajawali pers.

- Robbins, Stephen P. 1998, Perilaku Organisasi: Konsep, Kontrversi dan Aplikasi. Terjemahan Hadyana Pujaatmaka. Jakarta: Prenhallindo
- Saragih, Tumpal P. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa. Jakarta: CV. Cipiruy
- Soerjono Soekanto.1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali Umar
- Nimran.1999.Perilaku Organisasi.Surabaya : Citra Media Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Sondang P.Siagian.2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.